



260.000 Pekerja di DIY Peroleh Subsidi Upah

JOGJA-Sebanyak 263.632 pekerja di DIY bakal menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 per bulan.

Herambang Jati Kusumo & Jumali
redaksi@harianjogja.com

Pengumpulan data untuk penerima program Bantuan Subsidi Upah di DIY telah mencapai 75% dari target penerima hingga Kamis (13/8). Kepala BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) DIY, Asri Basri mengatakan untuk target jumlah di DIY mencapai 263.632 pekerja. "Yang sudah mengumpulkan rekening sekitar 75 persen atau 180.000-an," kata Asri, Kamis malam.

Diharapkannya nanti setelah semua data terkumpul dapat segera terealisasi dan dimanfaatkan oleh yang berhak mendapatkannya. Seperti diketahui, pemerintah memutuskan pegawai pemerintah non PNS akan mendapatkan bantuan Rp600.000/bulan mulai September hingga Desember 2020. Bantuan ini diberikan kepada pegawai swasta yang bergaji di bawah Rp5 juta, dan tidak berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai badan usaha milik negara (BUMN).

1.
2.
3.
4.
5.

Seiring dengan itu maka anggaran bantuan Rp600.000 pemerintah untuk subsidi upah ini juga naik menjadi Rp37,7 triliun dari semula Rp33,1 triliun.

► Halaman II

► Jamsostek sudah berkoordinasi dengan disnaker provinsi dan kabupaten/kota, Apindo, dan serikat pekerja.

► BPJS Ketenagakerjaan masih menunggu keluarnya Permenaker mengenai teknis pencairan BSU.

Nilai Berita

☐ Negatif

☐ Positif

☐ Netral

Tindak Lanjut

☐ Untuk Ditanggapi

☐ Untuk Diketahui

☐ Jumpa Pers

260.000 Pekerja...

Deputi Direktur Wilayah BP Jamsostek Jawa Tengah dan DIY, Suwilwan Rachmat, mengatakan untuk mendukung program pemerintah ini, Jamsostek sudah berkoordinasi dengan disnaker provinsi dan kabupaten/kota, Apindo, serikat pekerja/serikat buruh, Forum HRD dan pihak-pihak yang terkait langsung dalam pengumpulan rekening pekerja.

"Alhamdulillah dalam dua hari ini sudah terkumpul rekening pekerja di wilayah Jateng dan DIY sebanyak 783.027 nomor rekening dari potensi pekerja yang memenuhi ketentuan sebanyak 1.638.926 pekerja," ujarnya.

Tunggu Payung Hukum

Kepala Kantor Cabang, BPJS Ketenagakerjaan Bantul Unggul Syafla mengatakan ada sebanyak 33.200 pekerja yang kemungkinan mendapatkan BSU. Mereka adalah pekerja yang menerima upah di bawah Rp5 juta sesuai dengan ketentuan penerima BSU. "Untuk realisasinya kami belum tahu. Karena kami masih menunggu kejelasan pencairan dan juga peraturannya," ungkapnya.

"Di sisi lain, Unggul menyatakan selama periode Januari 2020 hingga kemarin, telah mengeluarkan uang sebesar Rp17,8 miliar untuk pencairan jaminan hari tua kepada 2.492 peserta. Untuk pencairan jaminan kecelakaan kerja mencapai 226,3 juta

kepada 40 peserta atau 40 kasus kecelakaan kerja dan pencairan untuk jaminan kematian untuk 23 kasus kematian termasuk di antaranya pemberian santunan jaminan kematian untuk dua perangkat desa di Kabupaten Bantul. "Untuk pemberian santunan jaminan kematian diberikan sebesar Rp 42 juta untuk masing-masing peserta," katanya.

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Pumpida Hidayatullah mengatakan sampai saat ini masih menunggu keluarnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) mengenai teknis pencairan BSU. Sebab, sampai saat ini belum ada keputusan terkait dengan tindak lanjut rencana pencairan BSU. "Targetnya tanggal 20-an. Tetapi jika belum ada Permenaker, kami belum bisa bicara banyak," katanya.

Kendati belum ada kejelasan, BPJS Ketenagakerjaan, lanjut Pumpida, saat ini mulai bersiap. Salah satunya adalah meminta *update* data dari masing-masing perusahaan terkait dengan kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, selama ini banyak perusahaan yang tidak mencantumkan nomor rekening peserta BPJS. "Jadi masing-masing manajer sumber daya manusia [SDM] di perusahaan kan bisa mengakses data kami dan melakukan *update* terkait dengan hal tersebut," lanjutnya.

Plt Kepala Disnakertrans Bantul,

Aris Suharyanta, mengatakan masih menunggu kejelasan dari Disnakertrans DIY terkait dengan pencairan dan jumlah penerima BSU. Aris mengaku tidak ingin salah langkah dengan mendata sebelum ada kejelasan terkait dengan payung hukum serta kuota penerima. "Kami baru dalam tahap konsultasi dengan provinsi [Pemda DIY]. Apa yang harus kami lakukan terkait dengan BSU," katanya di sela-sela acara penyerahan santunan jaminan kematian kepada ahli waris dari dua perangkat desa di Kabupaten Bantul, Kamis di Gedung Parasamya, Bantul.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menjelaskan saat ini lembaganya sedang mengumpulkan nomor rekening peserta yang memenuhi kriteria dimaksud melalui kantor cabang di seluruh Indonesia. Pemerintah juga akan melakukan validasi ulang terkait dengan data yang disampaikan oleh BP Jamsostek untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran. Hal ini dilakukan karena sumber dana BSU berasal dari anggaran pemerintah.

Penerima Program Subsidi Upah ini sedikitnya berjumlah 15,7 juta pekerja yang merupakan peserta aktif BP Jamsostek di seluruh Indonesia. Hingga kemarin, telah berhasil dikumpulkan sekitar 3,5 juta rekening peserta dan akan terus meningkat.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005